

BAB II

PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA

A. Latar Belakang Tumbuhnya Pergerakan Nasional

Menjelang lahirnya Pergerakan Nasional, di dalam masyarakat Indonesia; sebagai masyarakat yang dijajah bangsa lain, terdapat berbagai keadaan yang serba ditekan. Keadaan yang demikian itu tidaklah terjadi dalam waktu singkat, akan tetapi berjalan selama puluhan tahun bahkan beberapa ratus tahun. Dalam kondisi semacam itu masyarakat Indonesia berada dalam penguasaan, penindasan dan penghisapan oleh penjajah, yang dalam aksinya adalah melaksanakan dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan. Hal itu terjadi sejak ikut campurnya Belanda di dalam masalah kekuasaan di Indonesia serta penerapan politik monopoli dan proteksi melalui Perserikatan Dagang VOC (Verenigde Oest Indische Compagnie). Tindakan VOC merupakan suatu pengurusan kekayaan bangsa Indonesia oleh suatu kongsi dagang yang dilindungi pemerintah Belanda, yang mengakibatkan hancurnya kerajaan-kerajaan pesisir dan pedagang-pedagang besar rakyat Indonesia. Hal itu lebih diintensifkan lagi dengan penerapan Cultur-Stelsel; yakni pembebanan untuk tanam paksa dan penyerahan hasilnya, yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan-kerajaan di pedalaman serta meningkatnya kemiskinan rakyat. Kondisi itu lebih diperburuk lagi dengan diterapkannya Stelsel Liberal yang memberikan kebebasan terhadap beroperasinya modal-modal swasta Belanda dan Bangsa Asing lainnya, untuk beramai-ramai menggali dan menghisap kekayaan bumi Indonesia; menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.⁶

Kondisi rakyat semacam itu tidak menguntungkan penjajah, sebab daya beli rakyat lemah, sehingga tidak dapat

⁶C.S.T. Kansil dan Julianto, Sejarah Perjuangan - Pergerakan Kebangsaan Indonesia(Jakarta: Erlangga, 1977), pp. 16, 17.

menunjang kepentingan penjajahan. Oleh karena itu pihak penjajah perlu mengangkat kembali taraf kehidupan rakyat dengan melaksanakan Politik Etis, yang intinya meliputi usaha-usaha perbaikan di bidang Irigasi (pengairan), Edukasi (pendidikan) dan Transmigrasi (pemindahan penduduk). Politik itu hakekatnya dapat dipandang sebagai usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dari pelaksanaan eksploitasi tanah jajahan di Indonesia. Sementara pendapat mengatakan sebagai Imperialisme Kebudayaan yang halus dan jahat.⁷ Dikatakan demikian, sebab dengan irigasi yang baik akan memungkinkan bagi perluasan modal baru, sedangkan dengan usaha pemukiman tanah-tanah kosong maka melalui transmigrasi memungkinkan dibukanya perkebunan-perkebunan penghasil barang ekspor, untuk mencukupi kebutuhan tenaga sedikit terdidik dan murah maka dilaksanakanlah pendidikan terbatas bagi rakyat Indonesia.⁸

Kerusakan dan keterbelakangan rakyat Indonesia telah meliputi segala segi kehidupan. Kesemuanya itu disebabkan oleh sifat dan sikap penjajah terhadap rakyat Indonesia, yaitu memecah dan menguasai serta membodohkan, melakukan diskriminasi serta berusaha menumbuhkan adanya pertambahan acuan yang menjelmakan khayal bahwa kesatuan hanya mungkin wujud di bawah naungan Belanda.

Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Indonesia serba dibatasi dalam mengusahakan perekonomiannya; tidak bebas dan serba salah dalam mengerjakan tanahnya. Sehingga banyak kehilangan kesempatan di samping mereka tidak bisa menentukan harga penjualan hasil usahanya, bahkan masih dibebani dengan berbagai macam pajak yang berat, yang didalam usaha pengumpulannya disertai paksaan dan tindak korupsi.⁹

⁷Ibid., p. 19.

⁸Margono, Ichtisar Sedjarah Pergerakan Nasional - (1908-1945) (Jakarta: Dephankam. Pusat Sedjarah ABRI., 1971), p. 4.

⁹Roeslan Abdulgani, Almarhum Dr. Soetomo yang Saya Kenal (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), pp. 8, 9.

Kehidupan sosial rakyat Indonesia, mengalami dis-integrasi yang makin luas dan berkepanjangan, perkembangannya statis dan menunjukkan immobilitas serta terjadinya heterogenitas corak pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan yang demikian disebabkan oleh sedikitnya perhatian sosial oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan ditambah dengan dilaksanakannya politik "Adu Domba" dan mempertajam diskriminasi yang didukung oleh klasifikasi masyarakat yang feodalistis, adat maupun lembaga serta kekuasaan tradisional yang ada.¹⁰

Di lapangan pendidikan, umumnya rakyat Indonesia tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf meraja lela di mana-mana; pendidikan baru dikenalkan kepada mereka karena didorong oleh kebutuhan akan adanya tenaga terdidik yang sedikit mempunyai keahlian untuk mendukung kelancaran penjajahan. Hal itu pun dilaksanakan secara diskriminatif, misalnya masuk sekolah rendah model Barat dilakukan secara selektif berdasarkan jabatan, kekayaan dan asal keturunan serta pendidikan orang tuanya.¹¹ Untuk menempuh pendidikan tingkat menengah dan atas, hanya terbuka bagi kaum bangsawan dan priyayi, sedangkan rakyat jelata tidak memperoleh hak maupun kesempatan.¹² Hal itu dilaksanakan, untuk mencegah tumbuhnya kaum intelegensia dari kalangan rakyat jelata yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan penjajahan Belanda di Indonesia.

Di lapangan budaya, pemerintah kolonial berusaha memperkuat adat istiadat dan lembaga-lembaga tradisional serta kekuasaan aristokrat yang terdapat dalam masyarakat yang feodalistis, sebagai saluran untuk memperlancar bagi jalannya ide kolonial yang berintikan eksploitasi dan ke-

¹⁰Margono, Ichtisar, op. cit., pp. 6, 7.

¹¹M. Masyhur Amin, Saham, op. cit., p. 11

¹²Margono, op. cit., p. 7.

patuhan rakyat kepada atasannya merupakan alat yang efektif untuk keperluan tersebut.¹³ Sehingga ikatan feodal dan ikatan tradisi lama masih tetap berlangsung, seperti : pengangkatan jabatan secara turun-temurun, penghormatan kepada atasan yang berlebihan, konservatisme dalam pendidikan serta berlangsungnya adat istiadat yang tidak ber manfaat.

Sementara itu pihak penjajah juga berusaha memasukkan nilai-nilai budaya Barat melalui politik "Asosiasi"; usaha mengganti kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah. Usaha ini menyebabkan terbongkarnya beberapa akar budaya pribumi pada sekelompok masyarakat, sehingga hampir kehilangan kepribadiannya.¹⁴

Di bidang Keagamaan; pemerintah kolonial yang sejak kedatangannya di Indonesia juga diperkuat oleh unsur-unsur keagamaan, yaitu ingin melemahkan agama Islam dan memperkuat agama Kristen, maka pelaksanaan sistem kolonial Belanda di Indonesia, yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam, berusaha menghambat bahkan meniadakan fanatisme terhadap Islam serta mencegah adanya keutuhan umat Islam. Hal itu tampak dengan dukungannya yang berlebihan terhadap perkembangan Kristen (pendidikan, rumah sakit), sehingga kelompok Islam dipandang dari segi sosial dapat dihindangi perasaan rendah diri. Tetapi sejarah membuktikan bahwa ketaatan kepada agama Islam di pedesaan menyebabkan orang-orang merasa tidak mungkin menerima pemerintahan kolonial sebagai bentuk pemerintahan yang syah dan langgeng dalam pikirannya, termasuk penduduk desa yang paling tidak berdidik sekalipun.¹⁵ Umat Islam terbagi dalam dua kelompok yang berbeda. Pertama, kelompok santri; yang taat dan patuh mengikuti ajaran agama Islam.

¹³M. Masyhur Amin, op. cit., p. 9.

¹⁴Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, penterj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), p. 32.

¹⁵Ibid.

Stelsel penjajahan telah menjadikan rakyat Indonesia selalu ragu di dalam tindakannya, takut dipersalahkan dan merasa rendah diri serta serba kecewa. Sehingga hilanglah segala hasrat untuk memulai pekerjaan atas kehendak sendiri yang akhirnya lari dari kenyataan hidup dan berkonspensi pada praktek-praktek spiritual yang bersifat escapistis serta mistik; seperti Gerakan Ratu Adil dan Gerakan Samin, sebagai cetusan bentuk perlawanan pasif yang mampu mereka lakukan.¹⁹ Rakyat seakan telah lupa obyektivitas, tidak pandai lagi melihat dan memahami keadaan dan kenyataan dengan akal sehat, tidak bisa lagi berfikir secara refleksif, lupa terhadap kebesaran bangsanya di masa lampau, bahkan seolah-olah membenarkan dan mempercayai bahwa keterbelakangannya dikarenakan oleh Kodrat Tuhan yang menjadikan mereka inferiur, sebagai hamba untuk selama-lamanya bagi kaum penjajah.²⁰

Penjajah telah membuat semakin kokohnya konservatisme dan memberikan kesempatan luas bagi tumbuhnya berbagai kepercayaan dan faham yang escapistis, memperkuat perasaan kedaerahan dan sifat mendewakan pemimpinnya. Kondisi demikian itulah yang mendorong tumbuhnya tekad sebagian masyarakat rakyat Indonesia, untuk melepaskan diri dari belenggu penderitaan dan kesengsaraan yang dilihatnya sebagai akibat penjajahan.

B. Proses Pertumbuhan Pergerakan Nasional dan Tujuannya

Usaha melepaskan diri dari penjajahan melalui kegiatan yang diorganisasikan secara rapi dan bersifat nasional, membutuhkan adanya faktor-faktor yang menumbuhkannya atau yang menggerakkannya, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam antara lain dapat disebutkan, ya-

¹⁹W.F. Wertheim, "Gerakan-gerakan Pembaharuan Agama Di Asia Selatan dan Asia Tenggara", dalam Islam di Indonesia; edit. Taufik Abdullah (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974), p. 59.

²⁰Margono, op. cit., p. 6.

itu adanya kesanggupan dan kecakapan berjuang dalam suatu kegiatan yang diorganisir serta kemampuan untuk memimpin dan menggerakkan potensi rakyat di dalamnya, baik dari kalangan terpelajar bangsa Indonesia maupun dari kalangan umat Islam yang semakin militan terhadap ajaran agamanya. Sedangkan faktor dari luar antara lain, adalah suasana kebangkitan bangsa-bangsa yang dijajah fihak Barat dan khususnya kemenangan Jepang atas Rusia.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam stelsel penjajahan pasti akan timbul suatu reaksi terhadap aksi penjajahan tersebut. Sebab di dalam pelaksanaannya terpaksa harus melahirkan tenaga-tenaga ataupun kondisi masyarakat yang pada waktunya akan menentang penjajahan itu sendiri. Seperti adanya pendidikan untuk rakyat Indonesia; meskipun kecil, pada akhirnya merupakan "blander" bagi pemerintah kolonial, karena memupuk tanpa disadari akan manusia-manusia Indonesia atau Inlander yang kesudahannya menjadi terbuka matanya dan mengerti bahwa bangsanya adalah sebagai bangsa kelas tiga dalam penjajahan.²¹ Mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia dalam keseluruhannya dengan pendidikan dan pengajaran yang lebih baik, dapat dipersiapkan dan dapat dibentuk agar lebih berhasil dalam perjuangan hidupnya.²² Adanya pembaharuan politik dan administrasi pemerintahan kolonial, membuahkan adanya sekelompok rakyat Indonesia dari golongan terpelajar untuk ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Sehingga akibatnya mereka memahami politik praktis dalam pemerintahan kolonial yang tegar berdiri di atas penderitaan rakyat Indonesia.

²¹ Ada tiga macam manusia di Indonesia pada masa penjajahan : Kelas satu, Belanda atau Kulit Putih. Kelas dua; Indo Belanda, Cina, Arab dan India atau yang dinamakan Vreemde Oosterlingen. Kelas tiga; Inlander yaitu anak-anak pribumi. Abu Hanifah, Renungan Perjuangan Bangsa - Dulu dan Sekarang (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), p. 8.

²² Darsjaf Rachman (penterj.), Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975). p. 63.

Hal itu mengetuk hatinya untuk memperjuangkan nasib dari bangsanya.²³ Demikian pula dengan adanya perbaikan hubungan komunikasi, memberikan kesempatan lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Komunikasi menyebabkan dapat diperolehnya informasi mengenai kegiatan rakyat negara-negara lain, juga sekaligus dapat dimanfaatkan oleh golongan terpelajar tersebut guna menyebar luaskan ide, gagasan dan semangat baru yang akan mendasar dan menggerakkan kebangunan rakyat Indonesia.

Meningkatnya hubungan umat Islam dengan Arab; antara lain dalam penunaian ibadah Haji, dan semakin kuatnya hubungan itu dengan makin banyaknya orang Indonesia yang belajar di sana, menjadikan makin berkembang di kalangan para Ulama pengetahuan tentang agama Islam dan secara bertahap berpengaruh pula terhadap mereka Gerakan-Pembaharuan Islam yang terjadi di negeri Islam Timur-Tengah. Pembaharuan itu menyadarkan mereka dalam praktek kehidupan beragamanya serta memberikan kepekaan bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berlaku sebagai rakyat yang dijajah oleh bangsa Barat.²⁴

Gerakan kemajuan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebangkitan nasional di negara-negara lain di Asia, yang inspirasinya adalah kemenangan Jepang atas Rusia yaitu pada tanggal 27 Mei 1905.²⁵ Kemenangan tersebut dapat dianggap sebagai canang yang membangunkan bangsa Asia dari rasa tidak mampu dan menjadi bukti bahwa bangsa Asia juga dapat mencapai tingkat kemajuan yang sebelumnya dianggap hanya dapat dicapai oleh bangsa Barat.

Kondisi rakyat Indonesia mulai menunjukkan ke arah modernisasi. Hasrat untuk mencapai kemajuan dengan me-

²³ Harry J. Benda, Bulan Sabit, *op. cit.*, p. 55.

²⁴ W. Poespoprodjo, Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926 (Bandung: Remadja Karya CV., 1984), pp. 13, 14 dan Abu Hanifah, Renungan, *op. cit.*, p. 11.

²⁵ Susanto Tirtoprodjo, Sejarah Pergerakan, *op. cit.*, p. 8.

nuntut pendidikan, merupakan bukti adanya kesadaran yang tepat mengenai kehendak zaman yang semakin berkembang. Tumbuhnya paham ataupun pengertian baru yang mulai berlaku ini, menimbulkan keberanian untuk meninggalkan tradisi lama yang tidak sesuai lagi dan memberikan dorongan semakin kuat untuk memperoleh kemajuan serta berusaha mengambil alih cara dan tehnik Barat guna menentang dan mengusir penjajahan.

Berkembangnya kebutuhan pendidikan dan pengajaran yang baik, menimbulkan problema baru bagi rakyat Indonesia dalam pembiayaannya. Banyak putra putri Indonesia tidak bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik disebabkan kekurangan biaya, sehingga menggerakkan Dr. Wahidin Soedirohoesodo untuk mendirikan Dana Belajar.²⁶ Sementara itu cita-cita untuk meningkatkan kedudukan dan martabat rakyat Indonesia juga mulai tumbuh di lingkungan pelajar Sekolah Dokter Jawa. Berkat kekayaan jiwa mereka yang terus dirangsang oleh pendidikan dan pengalamannya menyaksikan kesengsaraan rakyat yang disebabkan kebodohnya, menyambut baik usaha Dr. Wahidin. Oleh karena itu kampanye Dr. Wahidin makin mendorong dan memperbesar cita-cita mereka; maka pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908, mereka mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai Ketua.²⁷ Organisasi itu bertujuan untuk mencapai "kemajuan yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura".²⁸ Pada bulan Oktober 1908 untuk pertama kalinya mengadakan kongres di Yogya untuk mengesahkan statutenya yang telah dirumuskan sejak 20 Mei 1908 di Jakarta, juga mulai dibentuk pengurus besar organisasi itu. Kongres tersebut menetapkan seorang Bupati Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr Wahidin sebagai wakil

²⁶Yusmar Basri(edit.), Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Departemen P dan K., 1975), V, p. 181.

²⁷Margono, op. cit., p. 11.

²⁸Susanto Tirtopredjo, op. cit., p. 12.

ketua. Kegiatan politik pertamanya dilaksanakan th. 1917 dengan pengiriman seorang wakil delegasinya untuk menyampaikan suatu petisi dihadapan Ratu Wilhelmina, sehubungan dengan masalah Inlandsche Militie.²⁹

Di kalangan umat Islam, pengaruh Gerakan Pembaharuan Islam di Timur Tengah mengilhami berdirinya Djamiat choir th. 1905³⁰ serta munculnya organisasi Sarikat Islam th. 1912 yang tumbuh dari organisasi pendahulunya bernama Sarikat Dagang Islam; Organisasi ini didirikan sebagai jawaban atas rangsangan kegiatan ekonomi dan kesombongan rasial, khususnya orang-orang Cina sehubungan dengan berhasilnya Revolusi Cina. Juga dimaksudkan sebagai penolakan terhadap segala bentuk penghinaan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia dari manapun jua datangnya dan sekaligus merupakan reaksi terhadap aksi politik pengkristenan dari pihak kolonial.

Sarikat Islam berlainan dengan Budi Utomo yang didalam prakteknya hanya memperoleh anggota dari kalangan atas saja. Sarikat Islam yang sejak berdirinya diarahkan untuk rakyat jelata, berhasil mendapat anggota dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam waktu singkat meluas menjadi perkumpulan yang banyak anggotanya. Bukti meluasnya gerakan Sarikat Islam ini, adalah pada Kongres Nasionalnya yang pertama bulan Juni 1916 di Bandung, 80 Sarikat Islam lokal mengirimkan wakil-wakilnya ke kongres tersebut. Demikian pula dengan dipergunakannya istilah "Nasional" dalam kongres itu, untuk menegaskan bahwa Sarikat Islam mengusahakan supaya penduduk asli Indonesia menjadi satu bangsa. Jadi pada waktu itu lain dari BudiUtomo

²⁹Ibid., pp. 14, 15.

³⁰Djamiat Choir, adalah organisasi modern dari masyarakat Arab di Indonesia, yang diakui secara resmi berdiri pada th. 1905 di Jakarta. Di antara kegiatannya adalah mendirikan Sekolah Dasar untuk masyarakat Arab, anak-anak Indonesia juga diperbolehkan masuk sekolah ini. A.P.E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ? (Jakarta: Grafitipers, 1985), pp. 3, 4.

yang terbatas pada Jawa Madura saja, tetapi Sarikat Islam meningkat pada usaha mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu Bangsa.³¹ Lagi pula penggunaan agama sebagai alat pengikat dan pemersatu, manjamin sukses bagi Sarikat Islam pada masa permulaannya dalam upaya memperoleh dukungan rakyat banyak terhadap aktifitasnya.

Satu masukan yang tidak kecil artinya bagi pertumbuhan perasaan nasional yang menumbuhkan kegiatan nasional, adalah identitas nasional ialah Islam; orang bumi pu tera adalah Islam, orang Kristen adalah orang asing.³² Hal itu dikuatkan oleh praktek ras diskriminasi di dalam sistim perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan pemerintah Hindia Belanda. Bagi rakyat Indonesia, Islam berfungsi sebagai titik pusat identitas di dalam melambangkan keterpisahan dari dan perlawanannya terhadap penguasa Kristen dan Asing.³³ Perasaan seagama yang meliputi bagian terbesar rakyat Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada satu dua pulau saja, tetapi meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia, menjadikan perasaan kedaerahan dapat cepat diatasi serta memberi dasar yang luas dan subur bagi tumbuhnya benih nasionalisme.³⁴

Organisasi pergerakan yang muncul berikutnya, adalah Indische Partij yang didirikan pada bulan Desember 1912. Organisasi ini lahir dengan konsepsi politik secara nyata, ingin memperbaiki posisi sosial rakyat Indonesia dengan cara melawan politik Belanda. Para pemimpin organisasi ini mempunyai pandangan politik yang tajam; dikemukakan bahwa soal politik jajahan adalah bukan soal perasaan tetapi soal perhitungan dan realitas serta perimbangan kekuatan. Oleh karena itu akan diusahakan mengatur perlawanan

³¹Susanto Tirtoprodjo, op. cit., pp. 27, 29.

³²W. Poespoprodjo, Jejak-Jejak, op. cit., p. 18.

³³Harry J. Benda, op. cit., p. 32.

³⁴Sy. Prawiranegara, Islam Dalam Pergolakan Dunia (Bandung: Alma'arif, 1950), p. 46.

an dengan menarik serta mempergunakan tenaga-tenaga anti penjajahan, melalui upaya menyadarkan rakyat Indonesia; dengan menghidupkan kembali rasa kebangsaan yang selama ini selalu ditekan. Mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang berdasar pada cinta tanah air, bagi seluruh golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia.³⁵

Melalui organisasi-organisasi tersebut kesadaran nasional ditumbuhkan dan dikembangkan. Dengan makin berkembangnya kesadaran nasional pada lapisan masyarakat Indonesia, menyebabkan timbulnya keaneka ragaman bentuk kegiatan pergerakan nasional serta semakin jelas arah tujuannya, yaitu untuk mencapai Indonesia Merdeka.

C. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Bentuk Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional, merupakan pergerakan bangsa yang dijajah melawan bangsa yang menjajah, untuk mendirikan suatu negara yang merdeka. Permulaan perjuangan bangsa Indonesia dalam bentuk pergerakan nasional, ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pemula; yang menghimpun rakyat Indonesia sesuai dengan macam aspirasinya.

Perjuangan di awal pergerakan, dilaksanakan dengan jalan kooperatif dan secara evolusioner, meskipun unsur revolusioner sudah mulai mewarnai kegiatannya. Dasar perjuangan belum secara tegas dinyatakan untuk kemerdekaan Indonesia, mengingat pada masa itu rakyat Indonesia tidak diperbolehkan berpolitik. Sehingga kegiatannya banyak ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan usaha mengatasi penderitaan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia. Dengan usaha tersebut, dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran nasional serta membangkitkannya agar menjadi semangat nasional yang melahirkan perjuangan pergerakan nasional.

³⁵Margono, op. cit., p. 40.

Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk : penyebaran dan perluasan pendidikan bagi rakyat, memperkuat perekonomiannya, mempertahankan nilai budayanya dan memperkuat kehidupan beragamanya serta memperbaiki hubungan sosial kemasyarakatannya. Sejalan dengan upaya itu dilaksanakan rapat-rapat umum, musyawarah dan propaganda untuk menjelaskan arti dan tujuan serta pentingnya pergerakan nasional. Di samping itu diadakan pembahasan tentang masalah praktis dan material yang menyangkut kehidupan rakyat Indonesia, seperti : ordonansi sewa tanah, praktek pengerahan kuli; koeli kontrak dan poenali sanctienya, kekacauan sehubungan dengan pemungutan pajak, hak berkumpul dan berapat serta sikap pegawai Eropa dan Indonesia.³⁶ Dikemukakan juga tentang keinginan politik dalam bentuk: mosi, kritik dan protes terhadap politik kolonial pemerintah Hindia Belanda yang dirasakan menghambat kemajuan bagi rakyat Indonesia.

Perjuangan pergerakan nasional secara nyata timbul didorong oleh persoalan pertahanan Indonesia sehubungan pecahnya Perang Dunia ke I. Kemampuan angkatan perang Hindia Belanda diperkirakan tidak mampu menahan invasi Jepang di Asia, sedangkan kewajiban militer kepada rakyat Indonesia belum ada. Oleh karena itu kalangan kolonial merasa perlu adanya wajib militer tersebut dan mencari dukungan dari organisasi pergerakan. Untuk itu organisasi pergerakan mau mendukung gagasan tersebut dengan syarat, antara lain : diberikannya persamaan derajat bagi rakyat Indonesia, yakni dengan dilaksanakannya pemerintahan yang baik dan diakhirinya penindasan, diberikannya kemerdekaan politik kepada Indonesia dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad).³⁷

³⁶Ibid., p. 35.

³⁷A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., pp. 56 - 58. dan Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 29.

Perjuangan selanjutnya setelah terbentuknya Volksraad, diusahakan mempersatukan aliran-aliran yang waktu itu dapat dikatakan radikal kedalam suatu fraksi pada lembaga tersebut serta menggunakannya sebagai sarana perjuangannya. Maka pada bulan Nopember 1918 dibentuklah Radicale concentratie yang beranggotakan wakil-wakil dari organisasi ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging), Budi Utomo, Sarikat Islam dan Insulinde,³⁸ dengan tujuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar segera mewujudkan suatu parlemen yang bersifat legislatif dan menuntut tidak hanya wakil-wakil organisasi politik saja yang mewakili rakyat dalam lembaga tersebut, tetapi juga wakil dari golongan fungsional yang belum tergabung dalam organisasi politik.

Upaya lain yang ditempuh, adalah dengan menggunakan Sarekat Sekerja dan organisasi fungsional untuk mendukung kegiatan politik, seperti aksi mogok oleh kaum buruh yang didukung oleh organisasi pergerakan.³⁹

Tahapan selanjutnya, kegiatan pergerakan mulai dilaksanakan dengan aksi politik yang revolusioner dan radikal. Dasar perjuangan secara tegas disebutkan untuk kemerdekaan Indonesia, dengan azas perjuangannya yang menggunakan sikap non kooperatif. Pada masa ini pemogokan oleh kaum buruh yang didukung organisasi pergerakan mencapai puncaknya, sehingga terkenal di antara pemimpin organisasi pergerakan; Soerjopranoto yang dijuluki "De Stakings Koning" (Raja Pemogokan),⁴⁰ sehubungan dengan usaha serta aktifitasnya dalam aksi tersebut.

³⁸Susanto Tirtoprodjo, *op. cit.*, pp. 15, 31.

³⁹Pemogokan, bagi buruh merupakan cara yang tepat pada saat itu untuk menekan pihak pemerintah agar dapat menerima protes dan tuntutanannya serta merupakan "senjata" baru bagi rakyat Indonesia dalam menentang pemerintah. Margono, *op. cit.*, p. 54.

⁴⁰Pahlawan Kemerdekaan Nasional (Jakarta: Direktorat Publisitas Dep. Penerangan RI., 1967), I, p. 25.

Adanya pemogokan tersebut menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial, yang menganggapnya bahwa aksi tersebut dengan kuat akan dapat membantu terlaksananya cita-cita nasional yang tidak terlepas dari cita-cita politik. Untuk mengakhiri aksi itu dan sekaligus untuk mengatasi aktifitas pergerakan, maka dibuat rancangan tentang perubahan Regeerings Reglement yang di antaranya mempersempit hak bersuara bagi rakyat Indonesia. Diajukannya rancangan perubahan itu kepada sidang Tweede Kamer di negeri Belanda, menimbulkan aksi otonomi di kalangan organisasi pergerakan. Sebab soal perubahan itu telah menjadi pusat tempat bertautnya minat dan aksi sebagian besar dari kaum politik yang sedang mempermasalahkan nasib Indonesia. Terlaksananya perubahan itu akan memadamkan kegiatan politik kaum pergerakan yang hendak melepaskan Indonesia dari negeri Belanda. Hal itu menunjukkan makin jelasnya sikap pemerintah kolonial Belanda yang tidak akan melepaskan Indonesia. Organisasi pergerakan bersama organisasi Sarikat Sekerja melancarkan aksi otonomi dengan menyelenggarakan Rapat Umum tanggal 29 Januari 1922 dan menghidupkan kembali Radicale Concentratie tanggal 12 Nopember 1922.⁴¹ Badan ini merupakan Radicale Concentratie baru yang berdiri di luar Volksraad dan dimaksudkan sebagai badan kerja sama dari golongan-golongan yang nyata radikal dari organisasi pergerakan dan organisasi Sarikat Sekerja.

Menghadapi sikap reaksioner pemerintah kolonial terhadap pergerakan nasional, lebih-lebih setelah terjadinya Pemberontakan PKI th. 1926; yang dapat dipergunakan sebagai dalih untuk melumpuhkan pergerakan, maka organisasi pergerakan melaksanakan konsolidasi organisasi secara lebih luas dan mendalam, terutama untuk memperoleh dukungan rakyat yang semakin sadar terhadap nasionalisme. Upaya itu ditempuh dengan mendirikan Badan Gabungan yang diberi

⁴¹A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), p. 46.

nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927, meliputi : Partai Nasional Indonesia (PNI), Algemeene Studieclub, Partai Sarikat Islam (PSI), Budi Utomo, Pasundan, Sarikat Sumatra, Kaum Betawi dan Indonesische Studieclub. Badan gabungan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan arah dan aksi kebangsaan serta menghindari perselisihan di antara organisasi pergerakan.⁴² Aktifitas yang dilaksanakan, di antaranya : mengajukan mosi "Dari Rakyat kepada Rakyat" dengan maksud untuk memperkokoh persatuan pergerakan,⁴³ aksi umum menentang perbahan Regeerings Reglement, mendirikan Fonds Nasional, menunjuk organisasi Perhimpunan Indonesia sebagai corong pergerakan di negeri Belanda; agar dapat menyampaikan informasi sebenarnya kondisi Indonesia serta menyadap informasi tentang aktifitas dan kejadian di kalangan politik Belanda, juga melaksanakan rapat-rapat umum untuk menentang sistim pemerintahan kolonial.

Adanya persatuan yang kokoh di antara organisasi rakyat Indonesia serta situasi krisis ekonomi yang akan membuat rakyat semakin peka dan mudah menerima seruan para pemimpin pergerakan, maka pemerintah berusaha untuk memotong dan menindas aktifitas pergerakan dengan jalan : mengasingkan pemimpin pergerakan yang radikal, memaksakan kehidupan politik yang evolusional dan bersikap kooperasi memberlakukan peraturan tentang larangan berkumpul dan berapat, menindak secara hukum kepada pegawai pemerintah yang aktif dalam pergerakan dan melakukan pengawasan yang ketat oleh polisi terhadap aktifitas pergerakan.⁴⁴

⁴²Ibid., p. 74

⁴³Mosi tersebut berisi semacam ketentuan bagi anggota, bahwa di dalam propaganda organisasinya tidak boleh menyalahkan azas atau tujuan serta menyinggung perasaan yang merugikan anggota lainnya. Juga segala perselisihan di antara sesama anggota harus diselesaikan dengan jalan perundingan. Ibid., p. 75.

⁴⁴Harry J. Benda, Bulan Sabit, op. cit., p. 108.

Politik menindas itu, mempersempit lapangan aktifitas pergerakan, sehingga kegiatan kaum pergerakan banyak ditujukan kepada upaya penanggulangan akibat krisis ekonomi, seperti : Program Krisis PSI, adanya mosi sewa tanah, peningkatan pengajaran dan pelayaran serta kehidupan kaum tani. Meskipun dalam situasi terpepet, kaum pergerakan masih sempat melancarkan mosi menentang aturan pemerintah yang tidak memberi kesempatan gerak bagi aktifitas pergerakan yang revolusioner. Aktifitas pergerakan mengalami kemerosotan yang tidak hanya karena kehilangan kontak politik dengan anggotanya dan rakyat banyak, tetapi lebih dipercepat oleh pengelompokan pribadi serta ideologi dikalangan nasionalis yang banyak menimbulkan perpecahan di samping tindakan menindas dan memecah belah pemerintah kolonial Belanda.⁴⁵

Sehubungan dengan adanya politik penindasan itu, maka aktifitas pergerakan yang dapat dilaksanakan antara lain :

Pertama, perjuangan melalui Volksraad; dengan membentuk Fraksi Nasional, yang kegiatannya antara lain : mengadakan pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan yang ditangkap pemerintah sehubungan dengan kegiatannya yang revolusioner, mengajukan moso yang akhirnya diterima oleh Volksraad tentang perubahan Regeerings Reglement, menentang maksud pemerintah yang akan meningkatkan kekuatan pertahanan di Indonesia; usaha peningkatan pertahanan itu dipandang memerlukan biaya yang besar, sementara itu kondisi keuangan tidak menguntungkan serta tidak ada manfaatnya bagi rakyat, Fraksi berpendapat agar anggaran itu dipergunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Fraksi juga menuntut dicabutnya peraturan tentang Sekolah Liar.⁴⁶

⁴⁵Ibid., p. 107.

⁴⁶Yusmar Basri(edit.), op. cit., pp. 223 - 225.

Ke dua, mengajukan Petisi Soetardjo pada th. 1936, yang mengusulkan Indonesia berdiri sendiri tetapi tidak lepas dari kerjasama Belanda.⁴⁷ Petisi yang menimbulkan golongan pro dan kontra di kalangan pergerakan ini, akhirnya gagal karena ditolak oleh Pemerintah Belanda.

Adanya politik menindas itu, mendorong kaum pergerakan untuk mengadakan reorientasi dalam strategi dan taktik perjuangannya. Usaha itu dilaksanakan dengan mewujudkan persatuan dan kerjasama di antara organisasi pergerakan dan organisasi sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia; ialah mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tanggal 21 Mei 1939. Gabungan tersebut dimaksudkan sebagai badan pemusatan tenaga dan penyata fikiran umum dari rakyat Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Menuntut Indonesia Berparlemen dengan melaksanakan "Aksi Ramai".⁴⁸

2. Membentuk Badan Komite Parlemen Indonesia yang bertugas mengadakan kursus dan rapat, untuk meyakinkan rakyat Indonesia terhadap kewajibannya secara bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa.

3. Menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia dan menetapkannya sebagai badan tetap yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesentosaan rakyat Indonesia.

4. Mengajukan beberapa resolusi kepada pemerintah; pada bulan Agustus 1940 tentang parlemen dan pada bulan September 1940 terhadap sikap "menunda" pemerintah.

⁴⁷Petisi ini berisi permohonan agar dilaksanakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda dengan hak yang sama, untuk menyusun suatu rencana pemberian pemerintahan sendiri kepada Indonesia. *Ibid.*, pp. 225, 226.

⁴⁸Dalam upaya memperoleh dukungan seluruh rakyat terhadap tuntutannya, diperintahkan kepada segenap pengurus besar organisasi yang tergabung dalam GAPI, untuk menginstruksikan cabang-cabangnya mengadakan rapat "Indonesia Berparlemen" secara bersama-sama mulai tanggal 17 Desember 1939. Margono, *Ichtisar*, *op. cit.*, p. 153.

Sikap pemerintah kolonial yang tidak mau menetapkan perubahan apapun di Indonesia; tetapi menundanya sehingga Nederland merdeka kembali dari penguasaan Jerman dan terhadap tuntutan rakyat Indonesia dipandang cukup di selesaikan melalui Komisi Visman,⁴⁹ maka GAPI merubah Kongres Rakyat Indonesia menjadi Majelis Rakyat Indonesia yang dianggap sebagai suatu badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat berdasarkan demokrasi.⁵⁰ Tugasnya mendengarkan pikiran rakyat Indonesia dan mengambil keputusan tentang segala hal mengenai kepentingan rakyat. Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain : memilih pengurus harian dan menetapkan Kongres Majelis Rakyat Indonesia bulan Mei 1924 di Surakarta, bersama GAPI mengeluarkan satu surat sebaran berisi semacam pernyataan kesetiaan kepada pemerintah untuk mempertahankan keamanan dan ketentraman. Keluarnya surat edaran tersebut mengakibatkan keluarnya PSII dari kedua badan tersebut, dengan alasan bahwa pengurus harian dewan pimpinan MRI. telah bertindak tidak sepengetahuan anggota pengurus yang lain dan dianggap telah melampaui

⁴⁹Komisi ini dibentuk tanggal 14 September 1940, dengan nama Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen (Komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan), dikenal dengan Komisi Visman, yang bertugas mengumpulkan bahan masukan tentang keinginan bangsa Indonesia. Untuk itu GAPI menyerahkan Memorandum yang disetujui oleh 21.047 orang, 246 perkumpulan rakyat Indonesia, berisi tentang bentuk pemerintahan Indonesia yang diinginkan bangsa Indonesia. A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, p. 146.

⁵⁰Majelis Rakyat Indonesia (MRI), ditetapkan berdirinya pada Kongres Rakyat Indonesia ke II tanggal 13-14 September 1941. Majelis ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan yang terdiri dari wakil-wakil federasi besar, meliputi : GAPI (organisasi politik), MIAI (organisasi agama Islam) dan PVPN. (perkumpulan sekerja dari pegawai negeri). *Ibid.*, pp. 149 - 151.

hak-hak yang sudah ditetapkan bagi mereka. Akhirnya berkecamuk perang dengan Jepang; disusul pendaratannya di Indonesia bulan Maret 1942, mengakhiri jalan dan susunan politik di Indonesia, yang dalam keadaan perubahan politik pada waktu itu juga ternyata tidak mempunyai kemampuan apa-apa.

D. Beberapa Organisasi Pergerakan Nasional

Untuk mengetahui keikutsertaan rakyat Indonesia di dalam pergerakan nasional, perlu dikemukakan beberapa organisasi pergerakan yang menghimpun rakyat Indonesia sesuai dengan macam aspirasinya. Organisasi tersebut berangkat dengan benih nasionalisme yang berbeda, seperti : Benih nasionalisme "Jawa" dengan kebudayaan Jawa, benih nasionalisme "Islam" dengan KeIslaman, benih nasionalisme "Hindia" dengan Ke"tanah air"an dan benih nasionalisme "Kedaerahan". Selanjutnya benih-benih nasionalisme itu berkembang menjadi suatu bentuk Nasionalisme Indonesia. Di antara organisasi tersebut, antara lain : Budi Utomo, Sarikat Islam, Indische Partij dan Perserikatan Pasundan.

Budi Utomo yang dipandang sebagai organisasi pertama pergerakan nasional, didirikan atas anjuran Dokter Wahidin yang berusaha mendirikan Dana Belajar. Cita-cita tersebut diterima dan dikembangkan oleh para pelajar sekolah Dokter Jawa di Jakarta, dengan mendirikan suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan lebih luas dari Dana Belajar. Maka pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 bertempat di ruang pelajaran kelas satu STOVIA di Jakarta, dipimpin dr. Soetomo mendirikan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo.⁵¹ Massa pertama organisasi ini adalah para pelajar sehingga berdirinya organisasi tersebut perlu dirahasiakan agar tidak mendapat hambatan dari pemerintah kolonial.

⁵¹Margono, Ichtisar, op. cit., p. 13.

Di samping itu organisasi yang baru ini berusaha mencari dukungan dari pelajar-pelajar sekolah lain, pangreh projo yang berjiwa maju, pengusaha pribumi dan golongan cendekiawan lainnya. Tujuan pertamanya adalah untuk menginsyafkan kaum intelek Jawa yang bekerjasama dengan Belanda agar lebih banyak memperhatikan kepada bangsanya sendiri.⁵² Secara umum tujuan perkumpulan, adalah untuk turut mengusahakan kemajuan bagi orang Jawa pada umumnya guna membantu meringankan perjuangan hidupnya. Di dalam penerimaan anggota dibatasi, hanya mereka yang mempunyai keinsyafan dan semangat untuk mendukung dan menyebarluaskan gagasan Budi Utomo.

Setelah gagasan Budi Utomo mendapat dukungan makin luas di kalangan cendekiawan Jawa, maka corak Budi Utomo sebagai perkumpulan pelajar berubah menjadi perkumpulan priyayi. Hal itu sebagaimana diketahui dari hasil kongres pertamanya; para pelajar menyerahkan kepemimpinan organisasi itu kepada generasi yang lebih tua, dipilih sebagai ketua adalah seorang Bupati, yaitu RT. Aryo Tirtokusumo dan Dr. Wahidin sebagai wakil ketuanya. Tokok-tokoh lain seperti Dwidjosewojo dan Dr. Tjipto Mangunkusumo adalah sebagai anggotanya.⁵³

Diselenggarakannya kongres tersebut, memberikan nilai penting dalam kehidupan rakyat Indonesia, sebab kongres itu merupakan cetusan pertama dari suatu hidup baru; yakni di dalamnya dibicarakan secara parlementer tentang kepentingan umum orang-orang Jawa, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Meskipun jangkauannya terbatas, akan tetapi hal itu menunjukkan adanya kesanggupan sego- longan rakyat Indonesia untuk berinisiatif melaksanakan usahanya sendiri bagi kemajuan umum.

⁵²Abu Hanifah, Renungan, op. cit., p. 9.

⁵³Roeslan Abdulgani, Almerhum, op. cit., p. 28.

Berdasarkan statutenya yang ditetapkan dalam kongres tersebut, bahwa Budi Utomo bertujuan untuk membantu mencapai kemajuan tanah air dan bangsa yang harmonis di Jawa dan Madura, yang ditempuh dengan jalan yang syah dan membantu usaha golongan lain yang mempunyai kesamaan tujuan.⁵⁴ Secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperhatikan kepentingan pelajaran umumnya, seperti : mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan tingkat pengajaran di sekolah-sekolah untuk pribumi, memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah Dokter Jawa, mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak, meminta izin mendirikan sekolah-sekolah Desa, dan sebagainya.

2. Memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan,

3. Memajukan tehnik dan industri,

4. Menghidupkan kembali budaya dan ilmu yang lama,

5. Mempertinggi cita-cita kemanusiaan pada umumnya

6. Segala yang perlu untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat.⁵⁵

Melalui kongres itu pula ditetapkan jangkauan gerak Budi Utomo kepada penduduk Jawa dan Madura saja serta dinyatakan tidak bersifat revolusioner dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Kegiatan yang dipilihnya meliputi bidang sosial dan kebudayaan; khususnya pendidikan, sehingga perkumpulan itu dapat disebut sebagai gerakan kultur nasionalisme.⁵⁶ Selanjutnya karena cita-cita politik rakyat Indonesia makin meningkat, maka Budi Utomo terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan politik, yang dahulunya hanya bekerja berdasarkan kebudayaan dan sosial saja.

Organisasi pergerakan nasional berikutnya, adalah Sarikat Islam, Organisasi ini adalah kelanjutan dan pengembangan dari organisasi Sarikat Dagang Islam, yang di-

⁵⁴Margono, op. cit., p. 17.

⁵⁵Darsjaf Rachman, Kilasan, op. cit., pp. 55, 56.

⁵⁶Mohammad Hatta, Permulaan Bergerakan Nasional (Jakarta: Idayu Press, 1977), p. 9.

dirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Solo.⁵⁷ Pengembangan itu dilaksanakan dalam upaya memperluas lingkup kegiatannya, mengingat tujuan perkumpulan telah berkembang sedemikian luas; tidak terbatas pada bidang sosial ekonomi dan keagamaan saja, tetapi juga menjangkau di bidang politik. Maka di dalam pengajuannya untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum pada tanggal 10 September 1912, dipergunakan nama Sarikat Islam dengan Ketua pengurus besarnya yang pertama adalah Haji Samanhoedi dan sebagai komisarisnya HOS. Tjokroaminoto.

Sarikat Islam merupakan organisasi massa yang pertama di Indonesia yang berdasarkan Islam. Ia menghimpun beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda dengan keyakinan yang kuat terhadap paham masing-masing dalam menghadapi politik Belanda. Sebagaimana dari kelompok itu menentang keras, golongan yang lain hendak berusaha mencapai kemajuan secara berangsur-angsur dengan bantuan pemerintah. Dalam kegiatannya Sarikat Islam mencakup beberapa aspek perjuangan, yang meliputi bidang: Ekonomi, Sosial, Agama dan Politik. Sehingga ada yang menamakan Sarikat Islam merupakan gerakan nasionalistis-democratis-religious-ekonomis.⁵⁸

Pada awal perjuangannya, Sarikat Islam menyatakan tidak bergerak dalam bidang politik dan kegiatannya dilaksanakan melalui usahanya secara praktis dan material untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuannya, ialah :

⁵⁷Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 26. Pendapat lain menyebutkan Sarikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di kampung Sondakan Solo, yang dipelopori oleh Haji Samanhudi. M.A. Gani, Citra Dasar & Pole Perjuangan Sarikat Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), p. 10.

⁵⁸A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 4 dan Yusmar - Basri(edit.), op. cit., p. 188.

Hendak menjusun suatu masjarakat Islam agar hidup berkumpul mendjadi saudara; menggerakkan hati umat Islam supaya bersatu dan tolong-menolong; melakukan segala daja-upaja untuk mengangkat deradjat rakjat guna kesentausaan dan kemakmuran tanah tumpah-darahnja.⁵⁹

Meskipun demikian, tehnik dalam melaksanakan kegiatannya dan bekerjanya menggunakan cara-cara politik: yaitu mempengaruhi dan menguasai massa untuk menerima maksud-maksud tertentu dari perjuangannya, juga karena massa pendukungnya yang banyak, maka Sarikat Islam dipandang sebagai organisasi yang bercorak politik. Oleh karena itu pengakuan Sarikat Islam sebagai badan hukum yang merupakan organisasi nasional secara utuh, tidak dikabulkan oleh pemerintah dan hanya diakui sebagai organisasi-organisasi lokal yang masing-masing berdiri sendiri dan dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain melalui badan sentral.⁶⁰ Demikian halnya dengan corak demokrasinya serta sikap militansi yang siap berjuang, adalah merupakan bahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia yang bersendikan raja dan bangsawan feodal.

Organisasi pergerakan nasional yang sejak berdirinya merupakan organisasi politik adalah Indische Partij. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Tiga Serangkai; Douwes Dekker atau Setia Budi, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat yang dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara.⁶¹ Tujuannya adalah mempersatukan semua Indier; dengan tidak terbatas pada penduduk Indonesia asli, tetapi untuk semua orang yang lahir di Hindia Belanda dari keturunan manapun, dan mendorongnya untuk bekerjasama atas dasar persamaan hak politik nasional guna mengembangkan tanah air Hindia Belanda, dalam upaya mempersiapkan sebuah kehidupan bangsa yang merdeka.⁶²

⁵⁹Margono, op. cit., p. 26.

⁶⁰Ibid., p. 27.

⁶¹Susanto Tirtoprodjo, Sejarah, op. cit., p. 41.

⁶²Margono Djojohadikusumo, DR. E.F.E. Douwes Dekker,

pentensi M. Sianturi (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p.29.

Indische Partij yang didirikan atas dasar nasionalisme yang luas itu, adalah merupakan partai politik secara nyata dan bersikap radikal. Ia hendak mengatur perlawanan terhadap pemerintah kolonial, dengan menarik dan mempergunakan tenaga-tenaga anti penjajahan dengan sebaik-baiknya, melalui jalan menginsyafkan dan menyadarkan rakyat dengan menghidupkan kembali rasa kebangsaan. Hal itu seperti dinyatakan oleh Douwes Dekker bahwa didirikannya organisasi ini, adalah merupakan tindak perlawanan dari pihak koloni yang membayar pajak kepada Kerajaan penjajah yang memungut pajak. Oleh karena itu permohonan badan hukumnya tanggal 4 Maret 1913 ditolak dengan alasan karena ia merupakan organisasi politik dan mengancam akan merusak keamanan umum. Begitu pula dalam pengajuan ke dua setelah diadakan perubahan dan penyesuaian anggarannya, tetap ditolak bahkan dinyatakan sebagai partai terlarang.⁶³ Dengan adanya keputusan tersebut, maka Indische Partij sebagai organisasi mengalami kekandasan dan para pemimpinnya sepakat secara perorangan tetap memperjuangkan dan mempropagandakan ide dan gagasan perjuangannya. Perjuangannya itu seperti terlihat di dalam aktifitas mereka dalam Komite Bumiputera, yang mengakibatkan mereka dikenakan hukuman pengasingan. Sedangkan para anggotanya sebagian besar pindah ke perkumpulan Insulinde.

Organisasi pergerakan nasional lainnya yang tumbuh dari organisasi berdasarkan kedaerahan yang lebih khusus, di antaranya adalah Perserikatan Pasundan, yang didirikan pada bulan September 1914 di Jakarta. Tujuan perkumpulan ini semacam Budi Utomo, tetapi hanya ditujukan untuk daerah Pasundan saja.⁶⁴ Kegiatannya terutama mengenai kebudayaan, di samping kegiatan sosial lainnya. Dan baru se-

⁶³Yusmar Basri(edit.), op. cit., p. 192.

⁶⁴A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 9.

sudah tahun 1920 ia bertindak di lapangan politik. sehubungan dengan terpilihnya anggota-anggota perkumpulan tersebut sebagai anggota Dewan Propinsi dan Dewan Kabupaten.

Di dalam pergerakan nasional, organisasi ini mendukung usaha kemajuan ke arah persatuan dan cinta tanah-air Indonesia, yang dibuktikan dengan masuknya organisasi ini dalam Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Ke-bangsaan Indonesia (PPPKI). Dalam kongresnya tahun 1929, dijelaskan oleh ketuanya; Oto Subrata, bahwa Pasundan berdasar pada cita-cita persatuan Indonesia dan ikut bekerja di dalam PPPKI untuk kepentingan Indonesia seumumnya. Tetapi ia akan mengutamakan aksinya di lingkungan Sunda sebagai bagian dari nusa dan bangsa Indonesia.⁶⁵

Di dalam aktifitasnya Pasundan tetap berpegang teguh pada sikap kooperasi dengan pemerintah.

Dengan uraian tersebut, nyatalah bahwa pergerakan nasional di Indonesia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional.

⁶⁵Ibid., p. 66.